

### MERAWAT NKRI, Mencari Hikmah Kasus Ahok



**Oleh: Cecep Darmawan**

*Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia*

Kasus penistaan agama yg diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semestinya didudukkan secara proporsional dalam ranah hukum positif dan tidak dibawa ke ranah di luar hukum. Termasuk dibawa ke ranah politik, khususnya dgn adanya wacana "melengserkan" Presiden Jokowi krn dianggap melindungi Ahok. Hukum adalah panglima dan negara kita menganut prinsip negara hukum sehingga persoalan ini seharusnya tidak diseret seret ke ranah politik.

Sejatinya pun Ahok selain meminta maaf melalui media , lebih elok Ahok mendatangi pimpinan MUI dan pimpinan ormas ormas.Islam untuk meminta maaf atas.kejadian ini. Meski begitu bukan berarti proses hukum trhenti. silahkan proses.hukum berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian akan mengurangi tensi tensi politik sebagian kalangan khususnya umat Islam. Kita percaya.umat Islam.indonesia amat toleran dan pemaaf. Kita berharap Ahok lebih bijak menghadapi kasus.ini.

Sebaiknya kita semua sebagai warga negara yg kritis mengawal kasus ini dengan memberi kepercayaan yang penuh kepada.penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara adil dan

transparan. Kita pun tidak boleh mudah terhasut dan terprovokasi oleh berbagai informasi khususnya yg berkembang di media sosial yg terkadang membelah posisi masyarakat. Kita juga berharap pihak-pihak yang saling serang di medsos sebaiknya segera menghentikan diri buat kebaikan bersama. Kita semua harus legowo. Lebih elok jika semua pendukung dua pihak saling memaafkan. Semua pandangan yg indah kalau kita semua menurunkan ego kita masing-masing.

Sebenarnya kasus ini merupakan ujian juga bagi Polri untuk membuktikan diri sebagai lembaga mandiri dalam penegakan hukum dan menepis anggapan miring sebagian kalangan terhadap independensi Polri. Jika terjadi proses-proses penegakan hukum yg tidak sesuai prosedur alias ada indikasi penyelewengan maka masyarakat termasuk media segera melaporkannya kepada pihak Kapolri. Kapolri hrs segera meluruskan proses hukumnya seraya mengganti oknum penyidiknya dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Selain itu Kompolnas jg harus pro aktif dalam mengawal dan mengawasi kasus ini.. Bahkan lembaga DPR pun dapat mengawal dan mengawasi proses-proses penegakan hukum ini agar berjalan sesuai prosedur. Semoga selalu ada hikmah dibalik semua persoalan bangsa ini.. kita rekatkan kembali rasa kebangsaan kita dan kita semua dapat menjaga diri untuk kebaikan bersama. NKRI milik kita semua kita pula lah yang wajib merawatnya. (RED)